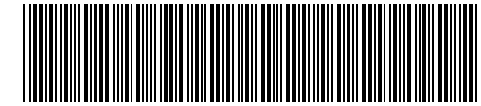




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408823/2019**



DS:8435-7201-0014-0820

Revisi ke 02

Tanggal : 27 Juni 2019

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (05) | DITJEN PEMASYARAKATAN |
| 3. Provinsi | : (12) | LAMPUNG |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408823) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG |
| Sebesar | : Rp. | 604.530.000 (ENAM RATUS EMPAT JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan
013.05.08.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	604.530.000
Rp.	604.530.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 604.530.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|------------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN BANDAR LAMPUNG | (017) Rp. | 604.530.000 |
|------------------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408823/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:8435-7201-0014-0820

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (408823) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

Kuasa Pengguna Anggaran : SEPRIZAL
Bendahara Pengeluaran : ARYA DWIJAYANTI
Pejabat Penanda Tangan SPM : AGUNG BUDIYANTO

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			604.530.000
Sub Fungsi	03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN			604.530.000
2 Program	013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan			604.530.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan			
	02	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri			
	03	Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan			
Indikator Kinerja Program	01	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan	90	Persen	
	01	Persentase Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan yang Berdaya Guna Setelah Bebas	15,2	Persen	
	01	Menurunnya Persentase Residivis	9,8	Persen	
Output Program	01	Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana			
Indikator Output Program	01	Persentase tahanan yang mendapatkan layanan tahanan sesuai standar	90	Persen	
	02	Persentase narapidana yang mendapatkan layanan pembinaan narapidana sesuai standar	90	Persen	
	03	Persentase Narapidana/Tahanan/Anak yang mendapatkan layanan perawatan sesuai standar	90	Persen	
	04	Persentase basan baran yang dikelola sesuai standar	90	Persen	
	05	Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	90	Persen	
	06	Persentase Klien yang mendapatkan layanan pembimbingan klien pemasarakatan sesuai standar	90	Persen	
	07	Persentase anak yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengentasan sesuai standar	90	Persen	
Kegiatan	5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			604.530.000
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasarakatan di wilayah			
	02	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar			
	03	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
	04	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar			
	05	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar			
	06	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
	07	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah sesuai standar			
	08	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar			
	09	Layanan Internal (Overhead)			
	10	Layanan Perkantoran			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408823/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:8435-7201-0014-0820

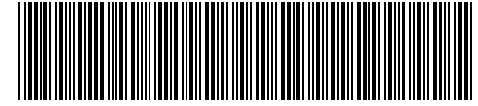
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (408823) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

Kuasa Pengguna Anggaran : SEPRIZAL
Bendahara Pengeluaran : ARYA DWIJAYANTI
Pejabat Penanda Tangan SPM : AGUNG BUDIYANTO

Halaman : IA.2

Sasaran Kegiatan	11	Meningkatnya Kapasitas Hunian
	12	Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Eselon I
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Persentase UPT Masyarakat di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas masyarakat di wilayah sesuai standar
	01	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar
	02	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar
	03	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar
	04	Jumlah narapidana narkoba yang memperoleh layanan rehabilitasi
	01	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar
	01	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar
	02	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar
	03	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar
	04	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar
	01	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar
	01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
	02	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar
	03	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar
	01	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar
	02	Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar
	03	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar
	01	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar
	02	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar
	01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel dan tepat waktu
	02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408823/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:8435-7201-0014-0820

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (408823) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

Kuasa Pengguna Anggaran : SEPRIZAL
Bendahara Pengeluaran : ARYA DWIJAYANTI
Pejabat Penanda Tangan SPM : AGUNG BUDIYANTO

Halaman : IA.3

Indikator Kinerja Kegiatan	03	Tersediannya data pegawai masyarakatan sesuai dengan kompetensi			
	04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu			
	05	Jumlah Kendaraan Bermotor			
	06	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			
	07	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			
	08	Jumlah Gedung/Bangunan			
	01	Jumlah Layanan Perkantoran			
	01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)			
	02	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)			
	03	Jumlah UPT Pembangunan Balai Masyarakatan (Bapas)			
	04	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan			
	01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu			
	02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar			
	03	Tersediannya data pegawai masyarakatan sesuai dengan kompetensi			
	04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu			
Output Kegiatan	5252.003	Pembinaan UPT Masyarakatan	21 UPT		543.545.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase UPT Masyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas masyarakatan di wilayah sesuai standar	90	%	
Output Kegiatan	5252.016	Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [PN]	1 Wilayah		60.985.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pemahaman masyarakat terkait Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak	14	Wilayah	

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Masyarakatan

ttd.
Sri Puguh Budi Utami
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408823/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8435-7201-0014-0820

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (408823) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408823	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	-	604.530	-	-	-	604.530		
013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	-	604.530	-	-	-	604.530		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	604.530	-	-	-	604.530		
5252.003	Pembinaan UPT Pemasarakatan	-	543.545	-	-	-	543.545	12 . 51	
01	RM	-	543.545	-	-	-	543.545	017	
5252.016	Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [PN]	-	60.985	-	-	-	60.985	12 . 01	
01	RM	-	60.985	-	-	-	60.985	017	
JUMLAH		-	604.530	-	-	-	604.530		

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Sri Puguh Budi Utami
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408823/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8435-7201-0014-0820

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (408823) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

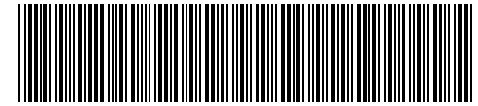
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408823	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	136.636	105.314	29.625	36.043	52.718	56.606	50.000	50.000	50.000	37.588	0	604.530
		52 BELANJA BARANG	0	136.636	105.314	29.625	36.043	52.718	56.606	50.000	50.000	50.000	37.588	0	604.530
	013.05.08.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	0	136.636	105.314	29.625	36.043	52.718	56.606	50.000	50.000	50.000	37.588	0	604.530
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	136.636	105.314	29.625	36.043	52.718	56.606	50.000	50.000	50.000	37.588	0	604.530

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Sri Puguh Budi Utami
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408823/2019
IV A. B L O K I R**



DS:8435-7201-0014-0820

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [408823] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

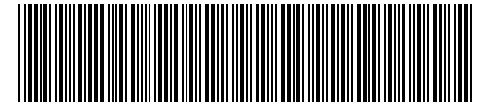
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Sri Puguh Budi Utami
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408823/2019
IV B. C A T A T A N**



DS:8435-7201-0014-0820

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [408823] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Sri Puguh Budi Utami
NIP 196207021987032001